



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Ryan Palasi

1120922059

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Ryan Palasi

1120922059

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



PANITIA UJIAN SIDANG TESIS PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA 2013/2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama : RYAN PALASI
NRP : 1120922059
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Jakarta, 23 Mei 2014

Yang bersangkutan



Ryan Palasi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UPN "VETERAN" Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RYAN PALASI
NRP : 1120922059
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jurusan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup".


Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPN "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 23 Mei 2014

Yang menyatakan


Ryan Palasi

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Proposal Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 10 Mei 2014

Pembimbing I



Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn

Pembimbing II



Dr. Erna Widjajati, SH, MH



DR. Hj. Erni Agustina, SH., SpN



**UPN "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : RYAN PALASI

NRP : 1120922059

Konsentrasi : Hukum Pidana

JudulTesis : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran
Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Dewan Penguji

Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2014

Dewan Penguji :

1. Dr. Hj. Erni Agustina, SH., Sp. N

()

2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU

()

3. Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn



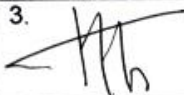
()

REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS

Nama : RYAN PALASI
 No. pokok : 1120922059
 Program Studi : Magister Hukum

- I. JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN INKGUNGAN HIDUP
- II. SUBSTANSI/TEORI :
- III. TEKNIK PENULISAN : Perbaikan permasalahan dan penulisan

TIM PENGUJI

No.	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Emi Agustina, SH., Sp. N	Penguji Lembaga	1. 
2.	Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU	Penguji Ahli	2. 
3.	Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn	Penguji Tesis	3. 

Jakarta, 23 Mei 2014

Telah Direvisi

Penguji Lembaga : 

Penguji Ahli : 

Penguji Tesis : 

ACC :

Kaprogdi : 

Tanggal : 23/5/14

Mengetahui,

A. n. DIREKTUR

Ketua Program



Dr. Hj. Emi Agustina, SH., Sp. N

ABSTRAK

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Nama : Ryan Palasi
NRP : 1120922059
Kata Kunci : Korporasi, Pidana, Lingkungan Hidup

Masalah tindak pidana lingkungan hidup di dalam sistem pemidanaan khususnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku dalam sistem pemidanaan. Perusakan lingkungan akibat kegiatan yang tidak memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, untuk itu diperlukan usaha yang terpadu untuk menanggulunginya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dan Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa Kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tindak pidana lingkungan hidup dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini merupakan payung hukum dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dapat mempergunakan asas *strict Liability* dan *vicarious Liability* yang telah dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Hambatan dalam penegakan hukum pelaku korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dapat dilihat bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan belum menjadi prioritas pemidanaan korporasi. Untuk meminta pertanggungjawaban korporasi maka asas tindak pidana tanpa kesalahan yang berlaku dalam hukum pidana selama ini menghambat penegakan hukum di sebabkan perangkat hukum perundang-undangan khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana.

ABSTRACT

Title : Corporate Criminal Liability Of Pollution And Environmental Damage
Name : Ryan Palasi
NRP : 1120922059
Key Word : Corporations, Criminal, Environment

Environmental crime issues in the criminal system, especially environmental destruction committed by the corporation is a fairly complicated problem to be addressed, especially regarding the perpetrators in the criminal system. Environmental degradation due to activities that do not pay attention to environmental preservation function may damage the ecosystem environment, it is necessary for a unified effort to address them. The purpose of this study was to determine the setting in the field of environmental crimes by Act No. 32 of 2009, to determine the accountability of corporate actors in the environmental field and to determine barriers to enforcement against corporate criminals in the environmental field. With the research method of normative juridical known that crime in the environmental field based on Law No. 32 of 2009 criminal offenses criminalized environment through legal instruments governing environmental protection and management of the Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH). This law is the legal umbrella of other legislation in the field of environmental protection. Accountability of corporate actors in the environmental field can use the principle of strict and vicarious Liability that has been adopted in Act No. 32 of 2009. Basically absolute liability is a form of evil that is in it does not require any element of error in sentencing, but only required the presence of an act. Barriers in law enforcement corporate actors who commit crimes in the environmental field can be seen that the provision of criminal sanctions against environmental pollution has not been a priority of the corporation criminal prosecution. To hold the principle of corporate criminal act without fault in the criminal law in force during this hamper law enforcement caused the laws of material criminal law in particular is still experiencing weakness because of the principle of accountability because of an error and against the law as a condition for the imposition of criminal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup".


Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat :

1. Koesnadi Kardi, MSc. RCDS selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn selaku Pembimbing I.
3. Dr. Erna Widjajati, SH, MH selaku Pembimbing II.
4. Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terimakasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 23 Mei 2014



Ryan Palasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
1. Kerangka Teoritis.....	15
2. Kerangka Konseptual.....	23
E. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Tahapan Penelitian	27
4. Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pengertian Perseroan Terbatas	31
B. Pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas.....	35
C. Pengelolaan Sumber Daya Alam di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	45
D. Kejahatan di bidang Lingkungan Hidup	47
E. Pidanaan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup ...	59
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	64
A. Pertanggungjawaban Pidana	64

B.	Pertanggungjawaban Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan (<i>Strict liability</i>) dan Pertanggungjawaban Pengganti (<i>Vicarious liability</i>)	69
C.	Tanggungjawab Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip “ <i>Duty of care</i> ”	85
D.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Liability On Fault Or Negligence atau Fault Liability	98

BAB IV	HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	110
A.	Penegakan Hukum oleh Criminal Justice System Terkait	110
B.	Kesulitan Pembuktian Perbuatan Pidana Akibat Kelalaian (<i>culpa</i>) dan Kesalahan (<i>schuld</i>)	115
BAB IV	PENUTUP	124
A.	Kesimpulan	124
B.	Saran	128

DAFTAR PUSTAKA